

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Definisi Bullying

Bullying merupakan salah satu bentuk perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu lain yang dianggap lebih lemah. Tindakan ini dilakukan secara berulang dan bertujuan untuk menyakiti, merendahkan, mengintimidasi, atau menguasai korban, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Dalam lingkungan pendidikan, bullying menjadi permasalahan yang serius karena tidak hanya mengganggu kenyamanan belajar, tetapi juga berdampak pada perkembangan sosial dan emosional peserta didik. Perilaku ini dapat terjadi di berbagai tempat, seperti di dalam kelas, lingkungan sekolah, maupun melalui media digital yang semakin berkembang pada era teknologi informasi (Fadil, 2023).

Bullying memiliki karakteristik utama berupa adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Ketidakseimbangan tersebut dapat berupa kekuatan fisik, pengaruh sosial, usia, jumlah kelompok, maupun kondisi ekonomi yang menyebabkan korban sulit melakukan perlawanan. Berbeda dengan konflik biasa yang melibatkan dua pihak dengan kekuatan yang relatif seimbang, bullying menunjukkan adanya dominasi satu pihak terhadap pihak lain.

Oleh karena itu, tindakan ini tidak dapat dianggap sebagai candaan atau perselisihan biasa, melainkan perilaku yang berpotensi menimbulkan dampak psikologis maupun sosial bagi korban (Damayanti et al., 2024).

Bullying tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik, tetapi juga mencakup berbagai bentuk perilaku yang dapat melukai kondisi psikologis korban. Bentuk bullying dapat berupa ejekan, penghinaan, pemberian julukan negatif, penyebaran fitnah, pengucilan dari kelompok pertemanan, ancaman, hingga penyalahgunaan media sosial atau cyberbullying. Perkembangan teknologi membuat bentuk bullying semakin beragam dan sulit dikendalikan sehingga diperlukan upaya pencegahan yang komprehensif melalui pendidikan karakter dan penguatan budaya sekolah yang positif.

Dalam perspektif pendidikan, bullying dipandang sebagai perilaku yang menghambat terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Peserta didik yang menjadi korban bullying cenderung mengalami penurunan motivasi belajar, rasa percaya diri, prestasi akademik, serta kesehatan mental. Oleh karena itu, sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan budaya saling menghargai, memperkuat pendidikan karakter, serta menerapkan kebijakan pencegahan dan penanganan bullying melalui kolaborasi antara guru, orang tua, dan peserta didik (Batubara et al., 2022).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa bullying merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja, berulang, dan melibatkan

ketimpangan kekuatan antara pelaku dengan korban. Perilaku ini tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga memengaruhi iklim sekolah secara keseluruhan karena dapat menurunkan rasa aman dan kualitas interaksi sosial antarpeserta didik. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai konsep bullying menjadi dasar penting dalam merancang strategi pencegahan melalui pembelajaran, penguatan nilai moral, dan pembentukan karakter peserta didik yang menghargai keberagaman.

2. Definisi Nilai Moral

Nilai moral dapat diartikan sebagai seperangkat prinsip atau pedoman yang mengatur perilaku individu dalam berinteraksi dengan orang lain dalam masyarakat, yang didasarkan pada pertimbangan baik atau buruk, benar atau salah. Nilai moral mencakup berbagai norma dan etika yang berhubungan dengan pengakuan atas hak-hak asasi manusia, kehormatan individu, serta kewajiban sosial yang harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Nilai ini bersifat universal, meskipun implementasinya bisa berbeda tergantung pada budaya, agama, dan sistem sosial yang berlaku dalam suatu komunitas (Puspitasari et al., 2023; Wahyuningrum, 2017). Dengan demikian, nilai moral bukan hanya berkaitan dengan keputusan individu, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial dan interaksi antar sesama (Amri & Hasibuan, 2025). Dalam konteks pendidikan, penguatan nilai moral menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter siswa.

Pendidikan moral tidak hanya bertujuan untuk mengajarkan siswa tentang apa yang baik dan buruk, tetapi lebih jauh lagi untuk membentuk sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari (Aljannah et al., 2024). Nilai moral yang diajarkan melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, misalnya, berfokus pada prinsip-prinsip seperti kejujuran, kedamaian, tanggung jawab, saling menghargai, dan keadilan (Puspitasari et al., 2023). Penerapan nilai-nilai ini dalam interaksi antar siswa di sekolah diharapkan dapat meminimalisir perilaku negatif, seperti bullying, yang kerap terjadi di kalangan pelajar (Wahyuningrum, 2017; Yuliani, 2018). Dengan menginternalisasi nilai moral sejak dini melalui pendidikan, diharapkan siswa dapat mengembangkan sikap empati, menghormati perbedaan, serta bertindak adil dalam setiap aspek kehidupan sosial mereka (Amri & Hasibuan, 2025).

3. Peran Nilai Moral dalam Pembentukan Karakter Siswa

Nilai moral memainkan peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter siswa, karena karakter yang kuat terbentuk dari internalisasi nilai-nilai yang mendasari perilaku dan keputusan yang diambil oleh individu dalam kehidupan sehari-hari (Aljannah et al., 2024; Puspitasari et al., 2023). Pendidikan moral, yang bertujuan untuk menanamkan prinsip-prinsip etis kepada siswa, sangat berperan dalam membentuk sikap mereka terhadap diri sendiri dan orang lain (Amri & Hasibuan, 2025; Wahyuningrum, 2017). Dalam konteks sekolah, karakter siswa tidak hanya diukur dari prestasi

akademik, tetapi juga dari sejauh mana mereka dapat menunjukkan perilaku yang baik, jujur, saling menghormati, dan bertanggung jawab (Fadil, 2023; Usmaedi & Mualimah, 2021). Pendidikan yang mengintegrasikan nilai moral dalam kurikulumnya, seperti melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PPKN), berfungsi untuk menanamkan pentingnya empati, keadilan, dan rasa tanggung jawab sosial (Puspitasari et al., 2023; Batubara et al., 2022). Nilai-nilai tersebut membantu siswa membangun perilaku positif dan menjadi individu yang berintegritas, yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian pribadi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar (Yuliani, 2018; Aljannah et al., 2024). Lebih jauh lagi, penerapan nilai moral dalam pembelajaran berkontribusi pada pengembangan pribadi siswa yang seimbang antara aspek intelektual, emosional, dan sosial (Naiborhu & Manullang, 2022; Damayanti et al., 2024).

Karakter yang berkembang dengan baik akan tercermin dalam sikap mereka dalam menyelesaikan masalah, berinteraksi dengan teman-teman, maupun dalam menjaga hubungan dengan guru dan orang tua (Sari & Devra, 2024; Astuti, 2023). Dalam hal ini, nilai moral membantu siswa untuk lebih mengerti pentingnya toleransi, kerjasama, dan penghargaan terhadap perbedaan (Wahyuningrum, 2017; Yuliani, 2018). Salah satu tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki etika yang baik dalam berinteraksi sosial, serta mampu beradaptasi dengan baik dalam kehidupan

masyarakat (Aljannah et al., 2024; Fadil, 2023). Pendidikan moral yang mengarah pada penguatan karakter siswa diharapkan dapat mencegah munculnya perilaku buruk seperti *bullying*, dengan menanamkan pemahaman bahwa setiap individu berhak dihormati dan diperlakukan dengan adil (Puspitasari et al., 2023; Amri & Hasibuan, 2025). Sehingga, melalui pembelajaran yang berbasis pada nilai moral, karakter siswa akan terbentuk dengan lebih kokoh dan mampu membawa dampak positif dalam kehidupan pribadi dan sosial mereka (Usmaedi & Mualimah, 2021; Yunita et al., 2021). Karakter yang berkembang dengan baik akan tercermin dalam sikap mereka dalam menyelesaikan masalah, berinteraksi dengan teman-teman, maupun dalam menjaga hubungan dengan guru dan orang tua (Sari & Devra, 2024; Astuti, 2023). Dalam hal ini, nilai moral membantu siswa untuk lebih mengerti pentingnya toleransi, kerjasama, dan penghargaan terhadap perbedaan (Wahyuningrum, 2017; Yuliani, 2018).

Jika dikaitkan dengan teori pendidikan karakter Thomas Lickona, pembentukan karakter mencakup tiga komponen utama, yaitu moral knowing (pengetahuan tentang nilai moral), moral feeling (sikap dan komitmen terhadap nilai tersebut), dan moral action (perwujudan nilai dalam tindakan nyata). Ketiga aspek ini harus dikembangkan secara simultan agar siswa tidak hanya memahami konsep moral secara kognitif, tetapi juga mampu menghayati dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki etika

yang baik dalam berinteraksi sosial, serta mampu beradaptasi dengan baik dalam kehidupan masyarakat (Aljannah et al., 2024; Fadil, 2023). Pendidikan moral yang mengarah pada penguatan karakter siswa diharapkan dapat mencegah munculnya perilaku buruk seperti *bullying*, dengan menanamkan pemahaman bahwa setiap individu berhak dihormati dan diperlakukan dengan adil (Puspitasari et al., 2023; Amri & Hasibuan, 2025). Sejalan dengan perspektif humanistik, pendidikan moral juga berfungsi membantu siswa mencapai aktualisasi diri melalui pengembangan nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, melalui pembelajaran yang berbasis pada nilai moral, karakter siswa akan terbentuk dengan lebih kokoh dan mampu membawa dampak positif dalam kehidupan pribadi dan sosial mereka (Usmaedi & Mualimah, 2021; Yunita et al., 2021).

4. Pendekatan Pendidikan Moral dalam Kurikulum Pendidikan

Pendekatan pendidikan moral dalam kurikulum pendidikan bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai etika dan moral dalam setiap aspek pembelajaran, bukan hanya terbatas pada pelajaran khusus mengenai moral (Amri & Hasibuan, 2025; Sari & Devra, 2024). Dalam kurikulum pendidikan yang diterapkan di Indonesia, pendidikan moral seringkali menjadi bagian dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PPKN), yang dirancang untuk menanamkan nilai-nilai dasar kewarganegaraan, seperti kejujuran, tanggung jawab, demokrasi, dan solidaritas (Wahyuningrum, 2017). Namun, pendidikan moral juga dapat diterapkan secara lintas kurikulum, di mana nilai-nilai seperti toleransi, kerja sama, dan

penghargaan terhadap perbedaan dapat ditemukan dalam berbagai mata pelajaran lainnya (Naiborhu & Manullang, 2022; Fadil, 2023). Dengan cara ini, pendidikan moral tidak hanya diajarkan sebagai konsep terpisah, tetapi menjadi bagian dari budaya sekolah dan proses belajar sehari-hari yang lebih menyeluruh (Aljannah et al., 2024; Puspitasari et al., 2023).

Salah satu pendekatan yang semakin diterapkan adalah pendekatan berbasis nilai yang berfokus pada pengembangan karakter melalui kegiatan belajar yang bersifat partisipatif, dialogis, dan reflektif (Damayanti et al., 2024; Aljannah et al., 2024). Melalui pendekatan ini, siswa diajak untuk berdiskusi, merenung, dan memecahkan masalah sosial dengan menggunakan nilai-nilai moral sebagai pedoman (Wahyuningrum, 2017). Dalam konteks ini, pembelajaran tidak hanya melibatkan penyampaian informasi, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku siswa secara aktif (Fadil, 2023). Misalnya, melalui simulasi, studi kasus, atau diskusi kelompok, siswa diajak untuk melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang dan untuk membuat keputusan yang memperhatikan kepentingan bersama (Yuliani, 2018; Naiborhu & Manullang, 2022). Pendekatan berbasis nilai ini membantu siswa untuk memahami pentingnya keputusan moral dalam kehidupan sehari-hari dan mengembangkan kemampuan mereka untuk bertindak sesuai dengan prinsip etis, sehingga mereka bisa menjadi individu yang bertanggung jawab dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat (Sari & Devra, 2024; Astuti, 2023). Dengan demikian, pendidikan moral dalam kurikulum pendidikan tidak hanya berfungsi untuk

mencetak individu yang cerdas, tetapi juga membentuk pribadi yang berbudi luhur dan mampu hidup berdampingan secara harmonis dengan sesama (Aljannah et al., 2024; Batubara et al., 2022).

Penerapan nilai moral dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PPKN) juga dapat dioptimalkan dengan mengintegrasikan materi anti-*bullying* sebagai bagian dari kurikulum. Salah satu cara yang efektif untuk menyampaikan materi ini adalah melalui metode pembelajaran yang interaktif dan partisipatif, seperti penggunaan Presentasi PowerPoint (PPT) atau media pembelajaran lainnya. Dengan memanfaatkan PPT, guru dapat menyampaikan informasi mengenai dampak negatif *bullying*, contoh-contoh kasus, serta cara-cara mencegah dan mengatasi *bullying* dengan pendekatan yang mudah dipahami oleh siswa (Sari & Devra, 2024; Astuti, 2023).. Selain itu, kegiatan diskusi kelompok yang diiringi dengan simulasi situasi *bullying* dapat membantu siswa memahami perspektif orang lain, serta mengembangkan empati dan sikap saling menghargai. Melalui metode ini, nilai-nilai moral yang terkandung dalam materi anti-*bullying* dapat dipelajari dengan cara yang lebih menyenangkan dan aplikatif, sehingga siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan materi anti-*bullying* dalam PPKN diharapkan dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan harmonis, sekaligus mendukung perkembangan karakter siswa yang berbudi luhur dan bertanggung jawab (Aljannah et al., 2024).

5. Peran Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan Pembentukan Karakter Siswa

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) memiliki peran yang sangat strategis dalam pembentukan karakter siswa, karena mata pelajaran ini tidak hanya mengajarkan siswa mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral yang mendasari perilaku sosial yang baik (Amri & Hasibuan, 2025; Puspitasari et al., 2023). PPKN memberikan siswa pemahaman mendalam mengenai konsep-konsep dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab (Fadil, 2023; Naiborhu & Manullang, 2022). Dalam proses Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, siswa tidak hanya belajar teori tentang norma-norma sosial, tetapi juga dihadapkan pada diskusi tentang masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat (Aljannah et al., 2024; Puspitasari et al., 2023). Dengan demikian, PPKN menjadi wahana untuk mengembangkan keterampilan sosial yang penting, seperti kemampuan untuk berkomunikasi, menghargai perbedaan, dan bekerja sama dengan orang lain (Wahyuningrum, 2017).

Jika diterapkan dengan baik, pembelajaran ini akan membantu siswa memahami pentingnya nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, serta membentuk karakter yang berlandaskan pada sikap yang jujur, adil, dan bertanggung jawab (Sari & Devra, 2024; Usmaedi & Mualimah, 2021). Selain itu, PPKN berperan dalam membentuk kesadaran sosial siswa

tentang peran mereka sebagai bagian dari masyarakat dan negara (Amri & Hasibuan, 2025). Oleh karena itu, PPKN bukan hanya berfungsi untuk memberikan pengetahuan tentang struktur dan sistem pemerintahan, tetapi juga untuk membentuk pribadi siswa yang bertanggung jawab, berintegritas, dan memiliki rasa peduli terhadap lingkungan sosial dan masyarakat.

Selain berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai, Pendidikan Kewarganegaraan juga berperan sebagai media pembiasaan sikap dan perilaku positif melalui praktik pembelajaran yang kontekstual dan partisipatif. Pendekatan pembelajaran yang melibatkan studi kasus, simulasi, diskusi kelompok, serta kegiatan proyek sosial mendorong siswa untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari-hari (Aljannah et al., 2024; Wahyuningrum, 2017). Melalui proses tersebut, siswa tidak hanya memahami konsep kewarganegaraan secara kognitif, tetapi juga mengembangkan dimensi afektif dan psikomotorik yang berkaitan dengan sikap empati, kepedulian sosial, serta tanggung jawab kolektif (Sari & Devra, 2024). Pembelajaran PPKN yang integratif dan reflektif dengan demikian mampu membentuk karakter siswa yang tidak hanya patuh terhadap aturan, tetapi juga memiliki kesadaran moral dan komitmen untuk berkontribusi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

6. Strategi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang Berfokus Penguatan Nilai Moral

Strategi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berfokus pada penguatan nilai moral bertujuan untuk tidak hanya mengembangkan pengetahuan siswa tentang kewarganegaraan, tetapi juga membentuk karakter dan sikap mereka dalam berinteraksi sosial (Puspitasari et al., 2023). Dalam konteks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, penguatan nilai moral mencakup pengajaran mengenai empati, toleransi, kejujuran, rasa tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap orang lain sebagai fondasi terbentuknya warga negara yang berkarakter dan berintegritas. Nilai-nilai tersebut tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi perlu diinternalisasi melalui proses pembelajaran yang reflektif dan kontekstual. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah pendekatan berbasis nilai, di mana siswa diajak untuk lebih memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip moral seperti keadilan, tanggung jawab, empati, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Naiborhu & Manullang, 2022). Dalam perspektif teori perkembangan moral Kohlberg, pembelajaran nilai membantu siswa berkembang dari tahap moralitas yang berorientasi pada kepatuhan menuju tahap yang lebih tinggi, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan prinsip etis universal.

Selain itu, menurut Lickona, pendidikan karakter yang efektif harus mencakup tiga komponen utama, yaitu moral knowing, moral feeling, dan moral action, sehingga nilai seperti kejujuran dan toleransi tidak hanya

diketahui, tetapi juga dirasakan pentingnya dan diwujudkan dalam tindakan nyata. Dalam pembelajaran ini, guru dapat menggunakan berbagai metode yang memungkinkan siswa untuk aktif terlibat, seperti diskusi kelompok, studi kasus, role play, atau simulasi yang menggambarkan situasi nyata yang membutuhkan keputusan moral (Fadil, 2023). Salah satu pendekatan yang relevan adalah *Value Clarification Technique* (VCT), yaitu teknik pembelajaran yang membantu siswa mengidentifikasi, memilih, dan menegaskan nilai-nilai yang mereka yakini melalui proses refleksi, dialog, dan pengambilan keputusan. Melalui VCT, siswa tidak dipaksa menerima nilai tertentu secara dogmatis, melainkan diajak untuk menganalisis berbagai pilihan nilai, mempertimbangkan konsekuensinya, serta menentukan sikap secara sadar dan bertanggung jawab. Pendekatan ini sejalan dengan teori pembelajaran sosial Bandura yang menekankan pentingnya proses observasi, refleksi, dan penguatan dalam pembentukan perilaku moral.

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga dihadapkan pada dilema sosial yang memerlukan pemahaman etis dan pemecahan masalah yang berbasis pada nilai moral yang diajarkan (Sari & Devra, 2024). Dengan cara ini, siswa dapat belajar untuk mengenali dan menerapkan nilai-nilai empati, toleransi, kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat dalam kehidupan sehari-hari mereka, baik di sekolah maupun di masyarakat (Puspitasari et al., 2023). Proses klarifikasi nilai melalui VCT juga membantu siswa membangun konsistensi antara nilai

yang diyakini dan perilaku yang ditampilkan, sehingga terbentuk integritas pribadi yang kuat. Selain itu, Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berfokus pada penguatan nilai moral juga dapat dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam setiap kegiatan pembelajaran, baik yang bersifat formal maupun non-formal (Batubara et al., 2022). Misalnya, dalam pembelajaran yang mengangkat tema tentang hak asasi manusia atau kebebasan berpendapat, guru dapat menekankan pentingnya menghargai perbedaan pendapat, mengedepankan toleransi, serta menghindari sikap diskriminatif (Fadil, 2023).

Dalam konteks ini, VCT dapat diterapkan melalui pemberian dilema moral atau pernyataan kontroversial yang memancing siswa untuk menyatakan sikap, memberikan alasan, serta merefleksikan kembali nilai yang mereka anut. Pembelajaran ini dapat dilengkapi dengan kegiatan ekstrakurikuler yang mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, saling menghargai, dan gotong royong, yang berfungsi sebagai wadah bagi siswa untuk mengaplikasikan nilai moral dalam kehidupan mereka sehari-hari (Sari & Devra, 2024). Di samping itu, pembelajaran yang berbasis pada proyek atau tindakan nyata juga bisa menjadi alternatif efektif untuk mengajarkan nilai moral, seperti kegiatan sosial yang melibatkan siswa dalam membantu masyarakat atau menyelesaikan masalah sosial (Naiborhu & Manullang, 2022). Kegiatan tersebut memperkuat dimensi moral action sebagaimana dikemukakan Lickona, karena siswa tidak hanya memahami nilai secara kognitif, tetapi juga mempraktikkannya secara langsung.

Strategi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berfokus pada penguatan nilai moral ini, terutama melalui penerapan *Value Clarification Technique* (VCT) dan pendekatan partisipatif lainnya, dapat membentuk karakter siswa yang lebih matang secara moral serta mengurangi potensi munculnya perilaku negatif seperti *bullying*, karena mereka telah dibekali dengan pemahaman, refleksi kritis, dan penerapan nilai-nilai moral yang kuat dalam setiap aspek kehidupan mereka (Amri & Hasibuan, 2025).

7. Perilaku *Bullying*

Perilaku *bullying*, baik yang terjadi secara fisik maupun melalui *cyberbullying*, dapat memberikan dampak yang merugikan bagi korban, baik secara psikologis, sosial, maupun fisik. Siswa yang menjadi korban *bullying* sering mengalami penurunan kepercayaan diri, kecemasan, depresi, dan stres, yang dapat mengganggu kesejahteraan mental mereka dalam jangka panjang (Puspitasari et al., 2023; Sari & Devra, 2024). Selain itu, *bullying* juga dapat menyebabkan isolasi sosial, di mana korban merasa terpinggirkan dan kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat (Naiborhu & Manullang, 2022). Dampak negatif lainnya termasuk gangguan pada prestasi akademik, karena konsentrasi siswa terganggu, serta perubahan perilaku, seperti menarik diri atau menjadi lebih agresif. Bahkan, *bullying* fisik dapat menyebabkan cedera yang mengganggu kesehatan fisik korban (Astuti, 2023). Perilaku *bullying*, baik yang terjadi secara fisik maupun melalui *cyberbullying*, dapat memberikan dampak yang merugikan

bagi korban, baik secara psikologis, sosial, maupun fisik. Siswa yang menjadi korban *bullying* sering mengalami penurunan kepercayaan diri, kecemasan, depresi, dan stres, yang dapat mengganggu kesejahteraan mental mereka dalam jangka panjang (Puspitasari et al., 2023; Sari & Devra, 2024). Selain itu, *bullying* juga dapat menyebabkan isolasi sosial, di mana korban merasa terpinggirkan dan kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat (Naiborhu & Manullang, 2022).

Selain berdampak pada korban, perilaku *bullying* juga mencerminkan lemahnya internalisasi nilai moral dan sosial pada pelaku, seperti empati, toleransi, dan rasa tanggung jawab terhadap sesama. Lingkungan sekolah yang kurang kondusif, pengawasan yang lemah, serta minimnya pendidikan karakter dapat memperbesar potensi terjadinya *bullying*, baik secara langsung maupun melalui media digital (Astuti, 2023). Oleh karena itu, upaya pencegahan *bullying* perlu dilakukan secara komprehensif melalui penguatan pendidikan karakter, penanaman nilai-nilai Pancasila, serta pembiasaan sikap saling menghargai di lingkungan sekolah. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membangun kesadaran siswa akan pentingnya menghormati hak orang lain dan menolak segala bentuk kekerasan, sehingga tercipta lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan sosial-emosional siswa secara optimal (Naiborhu & Manullang, 2022; Puspitasari et al., 2023).

Berdasarkan penjelasan berbagai penelitian tersebut dapat diketahui jenis-jenis *bullying* yang dapat terjadi di sekolah sebagai berikut:

a. *Bullying Fisik*

Bullying fisik merupakan bentuk perundungan yang melibatkan kontak langsung untuk menyakiti tubuh korban. Tindakan ini mudah dikenali karena meninggalkan bekas fisik maupun kerusakan pada barang milik korban. Bentuk *bullying* fisik meliputi memukul, menendang, mendorong, menjegal, mencubit, menampar, merusak atau mengambil barang milik teman, serta tindakan kekerasan lainnya. Jenis *bullying* ini umumnya dilakukan oleh pelaku yang memiliki kekuatan fisik lebih besar dibandingkan korban sehingga menimbulkan rasa takut, cedera, dan trauma. Walaupun mudah dikenali, *bullying* fisik tetap memerlukan penanganan yang cepat agar tidak berkembang menjadi kekerasan yang lebih serius.

b. *Bullying Verbal*

Bullying verbal merupakan bentuk perundungan yang dilakukan melalui ucapan atau bahasa yang bertujuan merendahkan, mempermalukan, atau menyakiti perasaan korban. Bentuknya antara lain mengejek, memberikan julukan yang menghina, menghina kondisi fisik, agama, suku, status sosial, mengancam, memfitnah, serta menyebarkan gosip. *Bullying* verbal sering dianggap sebagai candaan sehingga kurang mendapat perhatian, padahal dampaknya dapat menurunkan rasa percaya diri, memicu kecemasan, dan mengganggu kesehatan mental peserta didik. Di lingkungan sekolah, *bullying* verbal termasuk jenis yang paling sering dijumpai dalam interaksi sehari-hari antarsiswa.

c. Bullying Relasional atau Sosial

Bullying relasional (*social bullying*) merupakan tindakan yang bertujuan merusak hubungan sosial atau mengucilkan korban dari kelompok pertemanan. Bentuknya meliputi mengabaikan korban, menghasut teman agar menjauhi seseorang, menyebarkan rumor, mempermalukan di depan umum, atau sengaja tidak melibatkan korban dalam kegiatan kelompok. Dampak dari bullying relasional sering kali tidak terlihat secara fisik, tetapi dapat menyebabkan korban merasa kesepian, kehilangan kepercayaan diri, mengalami stres, bahkan menarik diri dari lingkungan sosial. Jenis bullying ini banyak ditemukan pada interaksi antarteman sebaya di sekolah.

d. Cyberbullying

Cyberbullying merupakan bentuk bullying yang dilakukan melalui media digital, seperti media sosial, aplikasi pesan instan, permainan daring, atau platform komunikasi lainnya. Bentuk *cyberbullying* meliputi mengirim pesan yang menghina, menyebarkan foto atau video tanpa izin, memberikan komentar yang merendahkan, menyebarkan informasi palsu, hingga mengancam korban melalui media elektronik. Berbeda dengan bullying konvensional, *cyberbullying* dapat terjadi kapan saja dan menjangkau korban tanpa batas ruang dan waktu, sehingga dampaknya terhadap kondisi psikologis korban cenderung lebih besar apabila tidak segera ditangani.

8. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya *Bullying* di Sekolah

Terjadinya *bullying* di sekolah bukanlah fenomena yang muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor ini dapat berasal dari individu, keluarga, lingkungan sosial, hingga budaya sekolah itu sendiri (Puspitasari et al., 2023; Aljannah et al., 2024). *Bullying* sering kali terjadi karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan atau dominasi antara siswa, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perbedaan status sosial, gender, ras, atau kemampuan akademik (Sari & Devra, 2024; Naiborhu & Manullang, 2022). Dalam banyak kasus, pelaku *bullying* berusaha untuk menunjukkan superioritas atau untuk memperoleh kekuasaan dengan merendahkan orang lain (Fadil, 2023). Selain itu, faktor keluarga juga sangat berpengaruh, di mana pola asuh yang kurang mendukung, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau kurangnya perhatian orang tua, dapat mendorong anak untuk mengekspresikan perasaan frustrasi mereka melalui perilaku agresif (Amri & Hasibuan, 2025). Lingkungan sosial di luar sekolah, seperti pengaruh teman sebaya dan media sosial, juga berkontribusi dalam memperburuk perilaku *bullying*, dengan memberikan contoh yang salah tentang bagaimana seharusnya berinteraksi dengan orang lain (Wahyuningrum, 2017; Usmaedi & Mualimah, 2021). Di sisi lain, budaya sekolah yang tidak mendukung, kurangnya pengawasan, dan lemahnya kebijakan anti-*bullying* dapat memperburuk situasi ini, sehingga menciptakan lingkungan yang rentan terhadap terjadinya *bullying* (Batubara et al., 2022).

Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi *bullying* sangat penting untuk merancang strategi pencegahan yang efektif (Naiborhu & Manullang, 2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *bullying* di sekolah meliputi:

- a. Perbedaan Sosial dan Status: Siswa yang memiliki perbedaan status sosial, fisik, atau kemampuan akademik sering menjadi sasaran *bullying* karena dianggap lebih lemah atau berbeda oleh pelaku.
- b. Pola Asuh Keluarga: Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh kekerasan atau kurang perhatian cenderung memiliki potensi lebih besar untuk terlibat dalam *bullying*, baik sebagai pelaku maupun korban.
- c. Pengaruh Teman Sebaya: Lingkungan teman sebaya sangat berpengaruh terhadap perilaku siswa. Tekanan dari teman untuk mengikuti perilaku negatif, termasuk *bullying*, sering kali mendorong siswa untuk terlibat dalam tindakan tersebut.
- d. Media Sosial dan Teknologi: Perkembangan teknologi dan media sosial memudahkan terjadinya *bullying* dalam bentuk *cyberbullying*, di mana siswa dapat mengintimidasi atau mengejek korban melalui platform digital dengan lebih anonim dan lebih jauh dari pengawasan.
- e. Budaya Sekolah: Budaya sekolah yang tidak mengedepankan nilai-nilai inklusivitas dan penghargaan terhadap perbedaan dapat menciptakan iklim yang memungkinkan *bullying* berkembang. Sekolah yang kurang memiliki kebijakan anti-*bullying* yang jelas atau pengawasan yang ketat sering kali menjadi tempat subur bagi perilaku tersebut.
- f. Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan tentang *Bullying*: Kurangnya pemahaman siswa dan pendidik tentang dampak *bullying* dan pentingnya pencegahannya bisa menyebabkan rendahnya upaya untuk mengidentifikasi dan mengatasi perilaku ini sejak dini.

9. Teori Pendidikan Moral (Kohlberg)

Teori Pendidikan Moral yang dikemukakan oleh Lawrence Kohlberg menawarkan kerangka yang sangat relevan untuk memahami penguatan nilai moral dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PPKN), khususnya dalam upaya pencegahan perilaku *bullying*. Kohlberg mengembangkan teori perkembangan moral yang terbagi dalam tiga tahapan utama: pra-konvensional, konvensional, dan pasca-konvensional, yang masing-masing menggambarkan tingkat pemahaman individu terhadap konsep-konsep moral, mulai dari kepatuhan terhadap aturan hingga pencapaian pemahaman etis yang lebih mendalam (Puspitasari et al., 2023). Dalam konteks pendidikan, teori ini memberikan landasan yang kuat bagi pengajaran nilai-nilai moral seperti keadilan, empati, dan tanggung jawab, yang esensial dalam mengatasi perilaku *bullying*.

Penguatan nilai moral melalui pendidikan PPKN di SMPN 2 Padang, khususnya di kelas 7C, dapat memperkuat pemahaman siswa mengenai prinsip-prinsip moral yang lebih tinggi, seperti menghargai perbedaan dan bertindak adil dalam hubungan sosial mereka (Aljannah et al., 2024; Naiborhu & Manullang, 2022). Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kohlberg, individu yang berada pada tahap moralitas pasca-konvensional akan lebih mampu untuk memecahkan masalah sosial, seperti *bullying*, dengan mempertimbangkan hak-hak dan kesejahteraan orang lain, serta membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip moral yang universal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip teori Kohlberg dalam Pembelajaran Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan, siswa tidak hanya belajar teori kewarganegaraan, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai moral yang dapat mengurangi perilaku *bullying* dan menciptakan iklim sosial yang lebih sehat dan inklusif di lingkungan sekolah (Sari & Devra, 2024; Batubara et al., 2022).

10. Teori Pembelajaran Sosial (Bandura)

Teori Pembelajaran Sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura (1997) menekankan bahwa individu belajar melalui observasi, imitasi, dan modeling dalam konteks sosial. Dalam teori ini, Bandura mengemukakan bahwa perilaku sosial, termasuk perilaku agresif seperti *bullying*, dapat dipelajari melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain dan konsekuensinya (Aljannah et al., 2024). Bandura juga memperkenalkan konsep *self-efficacy*, yaitu keyakinan individu akan kemampuan dirinya untuk mengatasi tantangan, yang berperan penting dalam mempengaruhi perilaku mereka dalam situasi sosial. Dalam konteks penguatan nilai moral di pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PPKN), teori ini sangat relevan karena mengindikasikan bahwa siswa dapat belajar nilai-nilai moral melalui interaksi dengan teman sebaya, guru, dan lingkungan sekolah yang mendukung (Puspitasari et al., 2023).

Dengan menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan model positif, seperti melalui diskusi kelompok, role-play, atau simulasi kasus, siswa dapat mengamati dan meniru perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang diajarkan, seperti saling menghargai, empati, dan keadilan (Sari

& Devra, 2024). Lebih lanjut, teori ini juga menyarankan bahwa penguatan perilaku positif melalui penghargaan dan pengakuan dapat memperkuat keyakinan diri siswa dalam bertindak dengan cara yang baik, yang pada gilirannya dapat mencegah perilaku *bullying* (Naiborhu & Manullang, 2022). Oleh karena itu, penerapan teori pembelajaran sosial dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMPN 2 Padang, terutama di kelas 7C, dapat membantu menciptakan budaya sekolah yang lebih inklusif dan meminimalisir perilaku negatif, seperti *bullying*, dengan membentuk pola interaksi sosial yang positif di antara siswa (Fadil, 2023; Amri & Hasibuan, 2025).

11. Teori Interaksi Simbolik (George Herbert Mead & Herbert Blumer)

Teori Interaksi Simbolik yang dikembangkan oleh George Herbert Mead dan Herbert Blumer (1937, gagasan dasar awal abad ke-20, terutama dalam buku *Mind, Self, and Society*) berfokus pada bagaimana individu membentuk makna dan identitas diri melalui interaksi sosial dan simbol-simbol yang digunakan dalam komunikasi. Menurut teori ini, perilaku sosial bukan hanya dipengaruhi oleh norma dan aturan yang ada, tetapi juga oleh makna yang diberikan individu terhadap interaksi dan simbol-simbol yang ada dalam lingkungannya (Aljannah et al., 2024). Dalam konteks pendidikan dan pencegahan *bullying*, teori ini menunjukkan bahwa siswa membentuk identitas sosial mereka melalui interaksi dengan teman sebaya, guru, dan lingkungan sekolah. *Bullying*, sebagai perilaku yang merugikan, sering kali terjadi karena adanya ketidakpahaman terhadap makna simbolik yang

ditampilkan dalam interaksi, seperti ejekan, pengucilan, atau intimidasi, yang dapat mengarah pada pembentukan stigma sosial yang negatif (Puspitasari et al., 2023; Fadil, 2023). Keragaman sosial di sekolah, seperti perbedaan dalam status sosial, etnisitas, agama, gender, dan kemampuan akademik, dapat menciptakan ketegangan dan perbedaan yang mempengaruhi interaksi sosial antar siswa. Teori interaksi simbolik menjelaskan bahwa dalam konteks keragaman ini, simbol-simbol yang berkaitan dengan perbedaan-perbedaan tersebut dapat menciptakan makna negatif yang mendorong perilaku *bullying*, seperti pengucilan atau penghinaan terhadap kelompok yang dianggap berbeda (Naiborhu & Manullang, 2022). Oleh karena itu, keragaman sosial yang tinggi di sekolah berpotensi meningkatkan risiko *bullying* karena semakin banyaknya perbedaan yang harus dinegosiasikan dan diterima dalam interaksi sosial (Sari & Devra, 2024). Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, teori ini relevan karena memberikan pemahaman bahwa interaksi sosial yang positif dan berbasis pada nilai moral seperti saling menghargai, empati, dan keadilan dapat membantu siswa membangun identitas sosial yang inklusif dan mengurangi potensi munculnya perilaku *bullying* (Fadil, 2023; Aljannah et al., 2024). Penggunaan simbol-simbol yang mendukung pemahaman nilai-nilai moral, seperti sikap menghargai perbedaan, dapat mengubah makna yang diterima siswa dalam berinteraksi, sehingga menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat dan mendukung (Batubara et al., 2022).

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Nama Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Research Gap
Nurmala Sari, Desi Devrika Devra (2024)	Peran Pendidikan Kewarganegaraan (PPKN) dalam Mengatasi Kasus <i>Bullying</i> pada Peserta Didik	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi kasus di beberapa sekolah menengah pertama (SMP). Data dikumpulkan melalui wawancara dengan guru PPKN, observasi di kelas, dan analisis dokumen terkait kebijakan anti- <i>bullying</i> di sekolah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan (PPKN) berperan penting dalam mengatasi kasus <i>bullying</i> dengan menanamkan nilai moral yang mendorong siswa untuk saling menghormati dan peduli terhadap sesama. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang mengintegrasikan nilai Pancasila dan hak asasi manusia dapat mempengaruhi sikap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam menghindari perilaku <i>bullying</i> .	Penelitian ini mengidentifikasi kekurangan dalam implementasi PPKN yang lebih terstruktur dalam menangani kasus <i>bullying</i> secara langsung. Kurangnya pelatihan untuk guru PPKN dalam menangani <i>bullying</i> secara spesifik menjadi salah satu gap yang perlu diatasi dalam penelitian selanjutnya.
Murni Naiborhu, Manahan Manullang (2022)	Upaya Guru PPKN dalam Mencegah Perilaku <i>Bullying</i> di SMA Swasta Immanuel Kelurahan Madras Hulu Kecamatan Medan Polonia Kota Medan	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Peneliti melakukan wawancara dengan guru PPKN, siswa, dan staf sekolah	Penelitian ini menemukan bahwa guru PPKN di SMA Swasta Immanuel melakukan berbagai upaya dalam mencegah <i>bullying</i> , seperti menerapkan program diskusi nilai moral secara rutin, memberikan pembekalan tentang hak asasi manusia, dan menerapkan metode pembelajaran yang berbasis pada toleransi dan saling menghargai.	Penelitian ini tidak membahas secara rinci tentang evaluasi dan pengukuran efektivitas program pencegahan <i>bullying</i> di sekolah, yang dapat menjadi gap untuk penelitian selanjutnya, yang lebih menekankan pada analisis hasil jangka panjang

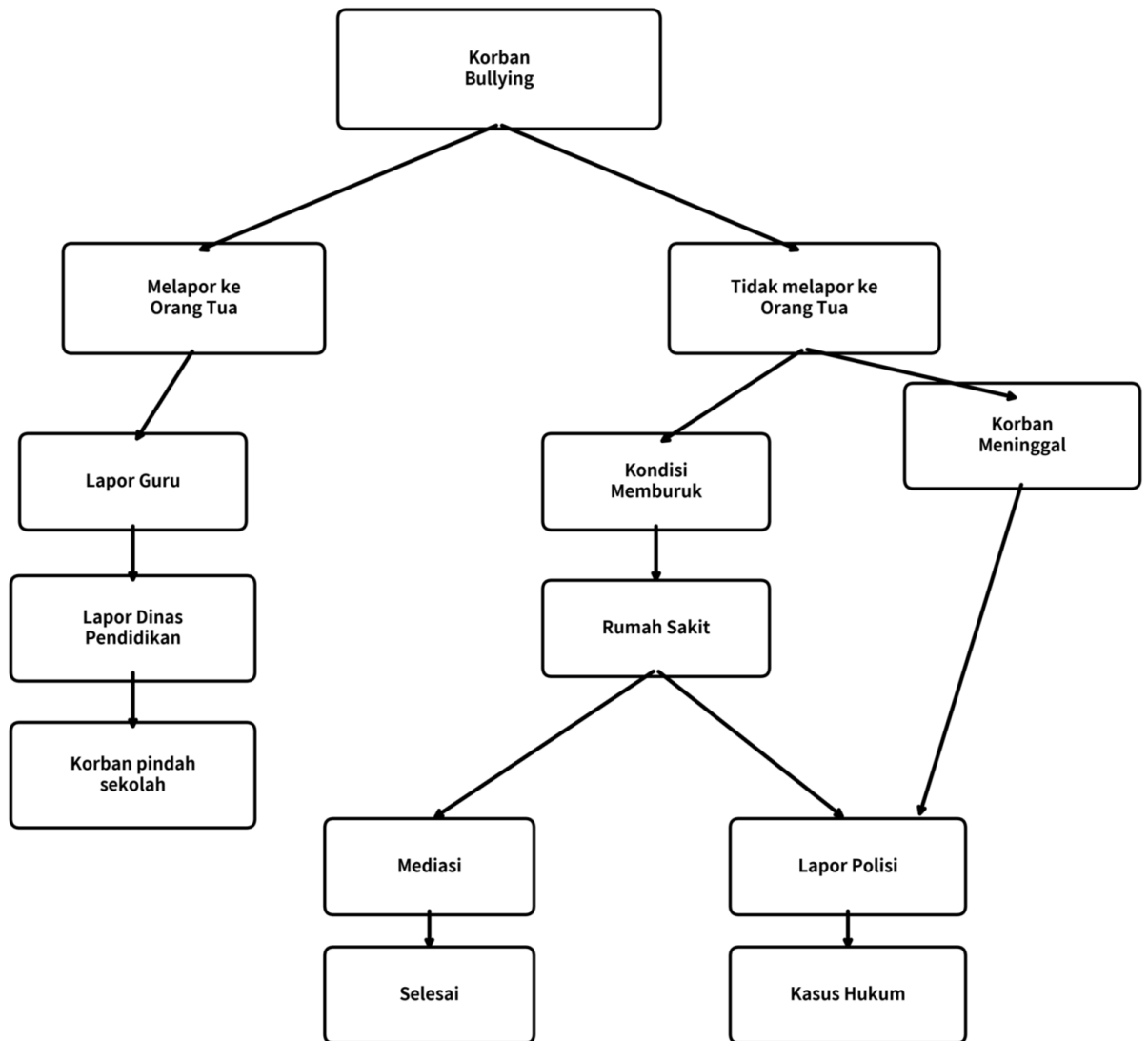
Nama Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Research Gap
		untuk memperoleh data tentang upaya pencegahan <i>bullying</i> yang dilakukan oleh pihak sekolah.	Namun, masih ada tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan secara konsisten di seluruh kelas.	dari intervensi yang dilakukan.
Eka Fauziah Pratiwi, Salwa Siti Sa'aadah, Dinie Anggraeni Dewi, Yayang Furi Furnamasa ri (2021)	Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan melalui Nilai Pancasila dalam Menangani Kasus <i>Bullying</i>	Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan survei dan kuesioner yang dibagikan kepada siswa dan guru PPKN di beberapa SMA di Jakarta. Data juga didukung oleh analisis dokumen dan kebijakan terkait.	Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila yang diajarkan dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, seperti keadilan, persatuan, dan kemanusiaan, efektif dalam mengurangi perilaku <i>bullying</i> di kalangan siswa. Namun, penerapan nilai tersebut belum merata di seluruh sekolah, dan perlu penguatan lebih lanjut dalam kurikulum dan pelatihan guru.	Gap yang ditemukan adalah kurangnya penelitian yang mengeksplorasi bagaimana nilai Pancasila diterapkan dalam konteks pembelajaran di luar kelas, dan bagaimana dampaknya terhadap perilaku siswa dalam jangka panjang.
Sapriya Usmaedi, Eka Nurul Muallimah (2021)	Optimalisasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengatasi Perilaku <i>Bullying</i> Siswa Sekolah Dasar	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus di beberapa sekolah dasar di Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan guru PPKN, siswa,	Penelitian ini menemukan bahwa pendidikan kewarganegaraan di tingkat sekolah dasar dapat berfungsi sebagai alat yang efektif dalam menanamkan nilai moral yang mengarah pada pengurangan perilaku <i>bullying</i> . Guru PPKN berhasil menanamkan pemahaman tentang pentingnya kerjasama, saling menghormati, dan empati terhadap sesama,	Meskipun pendidikan kewarganegaraan terbukti efektif dalam mengurangi perilaku <i>bullying</i> , gap yang ditemukan adalah kurangnya penelitian yang mendalami bagaimana kebijakan sekolah terkait dengan <i>bullying</i> diterapkan secara

Nama Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Research Gap
		orang tua, serta observasi di ruang kelas dan kegiatan sekolah. Peneliti juga menganalisis dokumen yang berkaitan dengan kebijakan sekolah tentang pencegahan <i>bullying</i> , serta materi yang diajarkan dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.	yang menjadi dasar dalam mencegah <i>bullying</i> verbal maupun fisik. Namun, penelitian juga mencatat adanya tantangan besar dalam mengubah perilaku siswa yang sudah terbiasa dengan praktik <i>bullying</i> di lingkungan sosial mereka. Pembelajaran yang terlalu teoritis tanpa disertai dengan latihan praktis dan contoh nyata di kehidupan sehari-hari cenderung tidak memberikan dampak signifikan terhadap perubahan sikap siswa.	konsisten di seluruh sekolah dasar. Penelitian ini juga belum membahas mengenai evaluasi jangka panjang dari implementasi program pencegahan <i>bullying</i> , yang perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui keberlanjutan hasilnya.
Khaidir Fadil (2023)	Peran Guru dalam Penanaman Sikap Anti <i>Bullying</i> Verbal dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam kepada guru PPKN, siswa, dan kepala sekolah, serta observasi di kelas-kelas yang melibatkan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Penelitian ini juga mencakup analisis dokumentasi yang berkaitan	Penelitian ini mengungkapkan bahwa guru PPKN memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk sikap anti- <i>bullying</i> verbal di kalangan siswa. Guru menggunakan metode diskusi kelas yang mendorong siswa untuk berbicara secara terbuka tentang perasaan mereka, serta memberikan contoh nyata tentang bagaimana kata-kata yang digunakan dapat mempengaruhi orang lain. Selain itu, guru juga memberikan latihan melalui permainan peran dan simulasi, di mana	Gap yang ditemukan adalah bahwa penelitian ini belum mengeksplorasi tentang bagaimana kolaborasi antara guru PPKN dengan orang tua atau komunitas dalam mengatasi <i>bullying</i> verbal di rumah dan lingkungan sekitar. Selain itu, evaluasi terhadap perubahan perilaku jangka panjang siswa setelah mengikuti Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan

Nama Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Research Gap
		dengan kebijakan anti- <i>bullying</i> dan program karakter di sekolah dasar.	siswa diberi kesempatan untuk menghadapi situasi <i>bullying</i> dan belajar bagaimana menanggapi dengan cara yang positif dan mendukung. Namun, meskipun ada upaya ini, masih terdapat tantangan dalam mengubah pola pikir siswa yang telah terpengaruh oleh budaya kekerasan verbal di lingkungan mereka.	Kewarganegaraan dengan fokus anti- <i>bullying</i> verbal juga masih kurang diteliti secara mendalam.
Puguh Yuli Astuti (2023)	Peran Guru dalam Menanamkan Pandangan Anti <i>Bullying</i> dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar Palengaan Laok	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam kepada guru PPKN, siswa, dan kepala sekolah. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung di kelas dan kegiatan ekstrakurikuler, serta menganalisis dokumen terkait program anti- <i>bullying</i> yang diterapkan di sekolah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PPKN di SD Palengaan Laok berhasil menanamkan pandangan anti- <i>bullying</i> melalui pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, dengan penekanan pada sikap saling menghargai dan menjaga keharmonisan antar siswa. Guru memberikan pendekatan yang holistik, yang tidak hanya mencakup teori, tetapi juga latihan-latihan praktis yang membentuk karakter siswa untuk menghindari tindakan <i>bullying</i> . Kegiatan yang dilakukan meliputi diskusi kelompok, permainan simulasi, dan proyek sosial yang mengajak siswa untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.	Penelitian ini tidak membahas mengenai peran komunitas sekolah yang lebih luas, termasuk orang tua dan masyarakat sekitar, dalam mendukung penerapan pandangan anti- <i>bullying</i> yang sudah ditanamkan di sekolah. Selain itu, studi ini juga tidak mengeksplorasi dampak jangka panjang dari pendidikan anti- <i>bullying</i> terhadap perubahan perilaku siswa setelah mereka lulus dari sekolah dasar, yang menjadi area yang belum banyak diteliti

C. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada pemahaman bahwa penguatan nilai moral dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat berperan signifikan dalam pencegahan perilaku *bullying* di kalangan siswa (Puspitasari et al., 2023). Dalam hal ini, PPKN tidak hanya berfungsi sebagai mata pelajaran yang mengajarkan konsep-konsep dasar kewarganegaraan, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk karakter siswa melalui internalisasi nilai-nilai moral yang relevan dengan kehidupan sosial mereka (Naiborhu & Manullang, 2022). Nilai-nilai moral seperti empati, kejujuran, saling menghargai, dan keadilan merupakan dasar dalam pembentukan perilaku yang sehat dan positif (Sari & Devra, 2024; Fadil, 2023). Melalui penerapan pendekatan berbasis nilai dalam PPKN, siswa diharapkan dapat memahami pentingnya menghargai perbedaan, menjaga solidaritas, dan memecahkan konflik secara damai, sehingga dapat mengurangi kecenderungan untuk terlibat dalam perilaku *bullying* (Wahyuningrum, 2017; Aljannah et al., 2024). Kerangka ini juga mengasumsikan bahwa karakter siswa yang kuat, yang terbentuk melalui penguatan nilai moral, akan membuat mereka lebih peka terhadap perilaku negatif di sekitarnya dan memiliki sikap untuk menanggapi *bullying* dengan cara yang konstruktif (Puspitasari et al., 2023; Usmaedi & Mualimah, 2021).



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Lebih lanjut, kerangka pemikiran ini berfokus pada pentingnya peran lingkungan sekolah dalam mendukung terciptanya iklim yang bebas dari *bullying*. Lingkungan sekolah yang aman dan mendukung berperan sebagai tempat yang kondusif untuk mengembangkan nilai-nilai moral (Batubara et al., 2022; Naiborhu & Manullang, 2022). Kebijakan anti-*bullying* yang diterapkan secara tegas, serta pendidikan karakter yang dilaksanakan dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, diharapkan dapat menciptakan budaya yang mengutamakan penghormatan terhadap hak-hak individu dan solidaritas sosial (Sari & Devra, 2024). Dengan demikian, penguatan nilai moral melalui PPKN dapat memengaruhi perubahan perilaku siswa dalam mengatasi perbedaan, mengurangi tindak kekerasan, dan membentuk interaksi yang lebih positif antar siswa (Fadil, 2023; Amri & Hasibuan, 2025). Kerangka pemikiran ini juga mempertimbangkan bahwa penerapan nilai moral tidak hanya berasal dari pengajaran guru, tetapi juga harus didukung oleh sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh seluruh civitas akademika di sekolah (Damayanti et al., 2024). Dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, diharapkan dapat tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari *bullying*, yang mendukung perkembangan karakter dan kesejahteraan sosial siswa (Wahyuningrum, 2017)